

# E-DATA DASAWISMA : PENGUATAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI AGEN DATA SIPIL PEMERINTAH ERA PASCA PANDEMI COVID-19

Binti Azizatun Nafi'ah

---

**Pengutipan:** Nafi'ah, B.A, (2020), E-Data Dasawisma : Penguatan Peran Perempuan Sebagai Agen Data Sipil Pemerintah Era Pasca Pandemi Covid-19, *Public Administration Journal of Research*, 2 (4), 454-463.

---

Program Studi Administrasi Publik, UPN "Veteran" Jawa Timur

**Email:** [binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id)

*(Submitted: 15-07-2020, Revised: 28-08-2020, Accepted: 17-09-2020)*

## ABSTRAK

Data kependudukan sangat penting dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, data yang dimiliki pemerintah belum terintegrasi, berbeda-beda, tumpang tindih, dan belum realtime. Hal ini menimbulkan beberapa kekacauan dalam penyaluran bantuan di masa pandemi covid-19 saat ini. Paper ini berfokus pada menganalisis penguatan peran perempuan sebagai agen data sipil pemerintah era pasca pandemi covid-19 melalui e-data dasawisma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder. Peneliti mengungkapkan bahwa e-data dasawisma mampu menyediakan data yang realtime dengan basis penguatan peran kader dasawisma.

**Kata Kunci :** data, dasawisma, perempuan, pemberdayaan.

## ***E-DATA DASAWISMA: STRENGTHENING THE ROLE OF WOMEN AS CIVIL DATA AGENTS OF THE POST-PANDEMIC ERA GOVERNMENT COVID-19***

## ABSTRACT

Population data is essential in making public policy. However, the data owned by the government is not yet integrated, different, overlapping, and not realtime. This created some chaos in the distribution of aid in pandemic period covid-19 today. This paper focuses on analyzing the strengthening of the role of women as government civil data agents in the post-Covid-19 pandemic era through e-data dasawisma. This study uses qualitative research with data collection through interviews and secondary data. Researchers reveal that e-data Dasawisma is able to provide real-time data on the basis of strengthening the role of Dasawisma cadres. **Keywords:** *data, dasawisma, women, empowerment*

## I. PENDAHULUAN

Integrasi data sangat penting dalam menentukan strategi yang cepat dalam menangani virus covid-19 di Indonesia. Pengambilan strategi penanganan covid-19 yang cepat, membutuhkan data yang akurat. Saat ini pemerintah belajar menyamakan data dari daerah hingga ke pusat (Eggham, 2020). Saat ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenalkan sistem integrasi data bernama Bersatu Lawan COVID-19 (BLC). Sistem ini memiliki fungsi integrasi dan konsolidasi data seperti data kesehatan, kependudukan, logistik,

dan data lainnya. Data tersebut dihimpun dari 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, kementerian, lembaga terkait, dan platform digital. Fungsi kedua sistem ini bisa dinikmati manfaatnya oleh publik lewat portal COVID19.go.id. Portal tersebut kini telah dikembangkan agar data terintegrasi dapat diakses publik dengan visual lebih detail.

Kendala pemutakhiran data sangat terlihat pada penyaluran bantuan sosial di daerah (Satria, 2020). Bantuan sosial merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS yang digunakan Kementerian sosial sebagai acuan belum dimutakhirkan sejak 2017 (CNN Indonesia, 2020b). Hal ini diperparah oleh pemerintah daerah yang belum melakukan pemugaran data di masing-masing wilayahnya. Alasan dasar belum dapat melakukan pemugaran data adalah tidak punya kemampuan anggaran dan tidak punya kemampuan update data.

Pemutakhiran data membutuhkan waktu yang cepat. Jika dilihat dari standar pemutakhiran data berdasarkan subdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial, membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan (Kemensos, 2018). Dalam masa pandemi, hal itu tentu tidak bisa dilakukan karena bantuan sosial sesegera mungkin untuk didistribusikan. Kendala lainnya adalah setiap kementerian memiliki data sendiri-sendiri, bahkan pada level daerah, antar dinas juga memiliki data sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan masing-masing instansi memiliki survey tersendiri. Fenomena ini sebelumnya telah dijelaskan Jayawardene et.al. (2013) dimana data yang berkualitas memenuhi tiga unsur yakni akurasi, kelengkapan, dan konsistensi. Geerts, et.al. (2016) menambahkan pentingnya spesifik dimensi data yaitu kemutakhiran data. Faktanya banyak data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron.

Dalam publikasi survey efektivitas bantuan sosial oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) disebutkan sebanyak 49% warga menyatakan bantuan sosial belum mencapai sasaran (SMRC, 2020). Penelitian lain, lembaga riset kebijakan publik SMERU Research Institute mencatat ada 458 dari 2.343 keluarga penerima manfaat sembako yang tidak layak menerima bantuan karena, pertama, sudah meninggal, sudah pindah alamat, atau kondisi sosial ekonominya tidak memenuhi syarat, bukan rumah tangga yang miskin atau rentan (Kurniawan, 2020). Di sisi lain, anggaran bantuan sosial meningkat pesat dan menjadi anggaran terbesar. Anggaran tersebut semula Rp405,1 triliun, kemudian terus bergerak naik hingga menjadi Rp695,2 triliun (Victoria, 2020). Dari jumlah tersebut, alokasi terbesarnya adalah untuk program perlindungan sosial yang mencapai Rp203,9 triliun atau sekitar 29,3% dari total anggaran. Ketidakakuratan data membuka celah korupsi dengan adanya kesempatan anggaran besar.

Perbedaan data berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Banyaknya jenis bantuan, mulai dari bansos presiden, bansos provinsi, bansos kabupaten/kota, hingga bantuan langsung tunai dana desa membuat masyarakat bingung karena tidak datang secara bersamaan (CNN Indonesia, 2020a). Terjadi penolakan bansos karena belum ada data yang valid seperti yang terjadi di Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dampak dari data yang tidak valid menimbulkan konflik horizontal dan terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat (Ruwaida, 2020).

Beberapa solusi pemutakhiran data telah dilakukan seperti integrasi data covid melalui satu jendela BLC dalam menyediakan data terupdate tentang covid. Untuk solusi pemutakhiran data kependudukan terkait dengan penyaluran bantuan sosial, dapat dilakukan melalui dasawisma seperti yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Program revolusi data melalui dasawisma telah ada sebelum pandemi covid. Program ini menyediakan data kependudukan persepuluh rumahtangga secara *real-time* dengan bantuan kader dasawisma. Melalui kegiatan ibu-ibu PKK mampu menyediakan data yang valid karena diupdate per minggu dan per bulan. Namun program ini memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya terbatasnya anggaran, kemampuan kader dasawisma, dan modal sosial (Nafi'ah, 2020). Berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan peran perempuan sebagai agen data sipil pemerintah era pasca pandemi covid-19 melalui dasawisma.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Agenda 17 poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah faktor penting untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni global. Sasaran-5 untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Jelas terlihat bahwa agenda sasaran-5 diderita hampir di seluruh belahan dunia, yang menciderai tujuan pembangunan berkelanjutan di dunia yang beradab (United Nations, 2020a).

Salah satu cara untuk memberikan kesetaraan gender adalah dengan memberi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Salah bentuknya adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan diartikan sebagai proses menumbuhkan kekuatan pada orang, untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka, dan dalam masyarakat mereka, dengan bertindak atas isu-isu yang mereka anggap penting (Page &

Czuba, 1999). Pemberdayaan adalah inti dari proses mempertahankan manfaat perempuan di tingkat individu, rumah tangga, komunitas dan yang lebih luas (Malhotra, 2009). Akibatnya perempuan meningkatkan statusnya melalui literasi, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran (Alvarez & Michelle, 2013). Maka pada program pengumpulan data dasawisma terdapat proses pemberdayaan, dimana kader dasawisma dilatih dan praktik memberikan kontribusi pencatatan data kependudukan sesuai fakta di masyarakat.

Konsep lain yang hampir terkait dan sama pentingnya dalam makalah ini adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender dipahami sebagai “hak, tanggung jawab, dan peluang individu tidak akan bergantung pada apakah mereka terlahir sebagai laki-laki atau perempuan” (warth & koparanova, 2012). Ini juga didefinisikan sebagai situasi di mana “... semua manusia bebas untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan membuat pilihan tanpa batasan yang ditetapkan oleh peran gender yang ketat; bahwa aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dianggap, dihargai dan disukai secara setara ”(Holzner, 2010). Tujuan akhir dari kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi atas dasar gender seseorang (Alvarez & Michelle, 2013).

### **PEREMPUAN DALAM ERA PANDEMI COVID-19**

United Nations (2020b) dalam policy brief yang berjudul *The Impact of COVID-19 on Women* menyimpulkan bahwa setiap rencana respons COVID-19, dan setiap program pemulihan serta penganggaran sumber daya, perlu mengatasi dampak gender dari pandemi ini. Ini berarti: (1) memasukkan wanita dan organisasi wanita di dalam penanggulangan COVID-19; (2) mengubah ketidaksetaraan pekerjaan perawatan tidak berbayar menjadi ekonomi perawatan baru yang inklusif yang berhasil untuk semua orang; dan (3) merancang rencana sosial-ekonomi yang berfokus masa depan perempuan dan anak perempuan. Menempatkan perempuan dan anak perempuan di pusat ekonomi pada dasarnya akan mendorong hasil pembangunan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua, mendukung pemulihan yang lebih cepat, dan mempercepat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### **III. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini menganalisis strategi yang tepat untuk menyediakan pemutakhiran data melalui penguatan peran perempuan dalam dasawisma untuk menyediakan data kependudukan yang *real-time*.

Dengan menggunakan basis data per sepuluh rumahtangga dan dilakukan update berkala maka data ini dapat menjadi basis data lengkap, tepat, dan cepat di daerah.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan purposive. Teknik ini mempertimbangkan keterlibatan langsung informan pada program dasawisma sebagai kader. Peneliti mewawancarai 4 kader dasawisma meliputi 4 kader dasawisma, 2 koordinator kader desa, dan 2 koordinator kader kecamatan.

Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan tiga jenis strategi (Creswell, 2010, p. 267) yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dan dokumen kualitatif. Setelah data terkumpul, pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi di lokasi penelitian kemudian disajikan dan dianalisa. Analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif pendekatan Miles dan Huberman, meliputi tahapan reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **PERAN PEREMPUAN DALAM REVOLUSI DATA DASAWISMA**

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sukses diterapkan pada era Suharto. Salah kegiatan dalam PKK adalah membentuk dasawisma. Kata ‘dasa’ berarti sepuluh dan ‘wisma’ berarti rumah, sehingga dasawisma berarti sepuluh rumah. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu berasal dari 10 rumah yang bertetangga. Kegiatannya diarahkan ada peningkatan kesehatan keluarga. Kader PKK bisa berasal dari 10 rumah itu (atas kesepakatan bersama), lalu ia akan mendorong program-program prioritas per periode kerja. PKK adalah organisasi yang bisa memiliki hierarki dan hubungan dengan lembaga pemerintahan desa hingga pemerintah pusat. Dasawisma hanya sebagai “obyek” pelaksanaan program nasional untuk tingkat terkecil (RT atau rukun tetangga).

Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah membuat basis data kependudukan dengan memanfaatkan peran kader dasawisma untuk pengumpulan data. Data yang dikumpulkan sangat detail meliputi data profil keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, *sandang*, *pangan*, dan *papan*. Data-data pribadi ini sangat penting dalam berbagai pengambilan keputusan. Bahkan beberapa penelitian menyebut data pribadi sebagai “new oil” (Budzyn, 2019; The economist, 2017), sebuah komoditi kunci (West, 2019) dan sebagai bentuk kapital baru (MIT Technology Review Custom, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada waktu itu sadar bahkan kebutuhan data menjadi keharusan. Ada permasalahan data waktu itu, Bojonegoro Institute melihat Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data agregat yang kurang detail sedangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membutuhkan data granular untuk menentukan kebijakan pemberantasan pengangguran. Data yang dibutuhkan nama orang dan alamat detail, sehingga mudah untuk membidik sasaran yang tepat. Data BPS belum dapat memberikan detail informasi tersebut. Hal ini sama seperti kasus bantuan bansos pada saat pandemi covid saat ini. Kemudian menentukan langkah-langkah mengimplementasikan pembuatan data kependudukan dengan basis dasawisma.

Pembangunan Revolusi Data di Kabupaten Bojonegoro, secara garis besar bisa dijelaskan dalam empat tahap, yaitu: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pengembangan Baseline Data, (3) Tahap Penggunaan Revolusi Data dan (4) Tahap Diseminasi dan Edukasi. Adapun indikator yang telah dicapai adalah 1) terlatihnya kader dasawisma PKK untuk input data (2 orang/desa-kelurahan); 2) terlaksananya proses inputing data dasawisma untuk seluruh 430 desa/kelurahan se-Bojonegoro; 3) terverifikasinya data hasil input kader dasawisma PKK sebagai data tunggal Pemkab Bojonegoro; 4) tersedianya visual dashboard pada aplikasi data dasawisma; dan 5) terinputnya data Bojonegoro pada portal data nasional data.go.id.

Sumber daya manusia program ini meliputi ibu-ibu PKK. Sumber daya manusia terdiri dari kader dasawisma, admin data dawis tingkat kelurahan, ketua koordinator dasawisma tingkat kelurahan, ketua koordinator dasawisma tingkat kecamatan, wakil ketua koordinator dasawisma tingkat kecamatan, admin data dasawisma tingkat kecamatan, admin data dasawisma tingkat kabupaten, dan ketua koordinator dasawisma tingkat kabupaten. Program ini bertumpu pada peran perempuan sebagai kader dasawisma.

Peran perempuan dalam program dasawisma dimulai dari *pertama*, kader dasawisma mendata per rumah sebanyak sepuluh rumah. Meskipun hanya 10 rumah tangga yang dipegang masing-masing, namun buku dasawisma memiliki kolom yang diisi per rumah tangga sangat banyak, mencapai 289 kolom. Buku dawis sangat rinci dan terupdate. Namun disisi lain, kader dasawisma merupakan tugas sampingan, disamping pekerjaan pokok ibu-ibu dalam sehari-hari sehingga ibu-ibu mengutamakan pekerjaan pokok terlebih dahulu.

*Kedua*, setelah data terkumpul, sepuluh buku dasawisma disetorkan kepada admin data dawis tingkat desa. Admin data desa menginput data dasawisma dari buku dasawisma ke form excel. Setelah data terinput, kemudian dikirim ke admin data dasawisma tingkat kecamatan.

*Ketiga*, data dasawisma dari desa-desa terkumpul di kecamatan, kemudian disetorkan melalui web ke admin data dasawisma tingkat kabupaten yang berdomisili di dinas Komunikasi dan Informasi. Dinkominfo melakukan pengolahan data kependudukan dasawisma kemudian dipublikasi melalui website data dawis online.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari terpublisnya data kependudukan secara online dan mendetail. Untuk menghindari penyalahgunaan data, hanya pihak-pihak berwenang yang berkaitan dengan kebijakan untuk menggunakan kumpulan data pribadi tersebut. Basis data tersebut yang digunakan untuk pemberian bantuan agar tepat sasaran.

Program ini memiliki dilema peran perempuan. Peran perempuan dalam menyiapkan data dasawisma sangat besar namun disisi lain perempuan bertugas sebagai ibu dengan segala urusan domestiknya. Hal ini berpengaruh pada proses pengumpulan data dasawisma. Ibu-ibu kader dawis lebih mengutamakan urusan domestik rumahtangganya terlebih dahulu kemudian melakukan tugas kader dawis. Akibatnya data dasawisma terlambat terupdate.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan revolusi data melalui data dawis meliputi sumber daya manusia yang berperan sebagai admin data ditingkat desa yang belum optimal dalam inputing, karena keterbatasan kemampuan. Kendala selanjutnya terdapat admin dasawisma yang pindah tempat, pindah kerja, dan lain-lain. Kendala lain juga disebutkan sekretaris TP-PKK kabupaten, Ibu Purwati bahwa data dasawisma tidak dapat memiliki kevalidan 100%. Tingkat kevalidan sekitar 89%. Pada tahun 2019, capaian rata-rata inputing 87.7% dari ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Permasalahan lainnya terkait SDM pada awal inisiasi adalah kekurangan SDM yang memenuhi penggunaan IT. Ibu-ibu desa sebagian besar belum bisa menggunakan komputer. Maka untuk inputing data disepakati dilakukan oleh admin desa. Kader menggunakan input manual dalam buku dasawisma.

## **E-DATA DASAWISMA DAN PANDEMI COVID-19**

Pandemi memperkuat dan mempertinggi semua ketidaksetaraan yang ada. Ketidaksetaraan ini pada gilirannya menentukan siapa yang terpengaruh, tingkat keparahan dampak itu, dan upaya kita untuk pemulihan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi serta telah menciptakan krisis global yang tak tertandingi dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pandemi ini membutuhkan respons seluruh masyarakat untuk menyesuaikan skala dan kompleksitasnya. Tetapi tanggapan ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, akan menjadi sangat lemah jika tidak memperhitungkan cara-cara di mana ketidaksetaraan membuat kita semua lebih rentan terhadap dampak krisis. Atau, jika

kita memilih untuk hanya mengulangi kebijakan masa lalu dan gagal menggunakan momen ini untuk membangun kembali masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan tangguh. Untuk itu, keberlanjutan program data dasawisma sebagai basis data pribadi menjadi mutlak. Program ini memerlukan payung hukum yang secara legal dapat menjadi rujukan sah keputusan publik.

Disisi lain, program ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam menginput data detail dari setiap anggota komunitas. Dengan demikian, peserta pelatihan adalah para ibu-ibu yang terlibat dalam organisasi PKK. Usai pelatihan selama satu hari, para peserta pelatihan kemudian diberi tugas membantu masyarakat untuk mengisi buku data Dasa Wisma (Dawis) secara manual. Data yang harus diisi cukup detail dan banyak yaitu 360 kolom. Maka, beberapa desa mengisi Dawis dengan bantuan relawan Bojonegoro Institute, yaitu lulusan perguruan tinggi yang datang ke desa tersebut untuk melakukan pendampingan langsung. Buku Dawis yang sudah lengkap diverifikasi sebelum diinput secara online ke aplikasi yang sudah digunakan sejak Oktober 2016.

Penginputan dilakukan oleh dua anggota PKK yang telah dilatih di tingkat kecamatan. Proses input menggunakan aplikasi khusus bernama Dasa Wisma yang langsung terkoneksi dengan portal data nasional ([data.go.id](http://data.go.id)). Dalam setiap hari kerja, ada dua orang yang hadir di kantor kepala desa, bekerja mulai pukul 08.00 hingga 12.00.

Jika dilihat kronologis program, program ini telah ada sejak 2016 yaitu sebelum pandemi covid-19. Pada saat pandemi covid-19, pemerintah kabupaten Bojonegoro menggunakan data dawis ini untuk memetakan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Selain mencocokkan dengan data bantuan yang bersumber dari eksternal, Pemerintah Bojonegoro memastikan pengupdatean data terjadi. Ibu-ibu kader dasawisma melakukan update data kependudukan secara berkala yakni setiap bulan. Kader dasawisma memastikan adanya kecocokan data dengan keadaan sebenarnya. Sehingga pada saat penyaluran bantuan sosial tidak terjadi keributan bahkan kecemburuan sosial. Hal ini dikarenakan pendataan dilakukan oleh kader dasawisma yang notabene merupakan tetangga dekat di lingkungan masyarakat.

## V. KESIMPULAN

Penguatan peran perempuan sebagai agen data sipil pemerintah era pasca pandemi covid-19 melalui e-dasawisma menjadi salah satu alternatif penyediaan data kependudukan yang real-time. Selain peran perempuan memiliki peran 'domestik' dalam rumahtangganya, nyatanya perempuan dapat berperan dalam pembangunan. Adanya peran perempuan dalam



pembangunan data kependudukan menyebabkan pendataan penyaluran bantuan tepat sasaran serta meminimalisir kecemburuan sosial. Program ini memerlukan payung hukum untuk legalitas penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvarez, L., & Michelle. (2013, October 2). From unheard screams to powerful voices: A case study of women's political empowerment in the Philippines. 12th National Convention on Statistics (NCS) EDSA, Shangri-La Hotel.
- Budzyn, A. (2019). Data is the oil of the digital world: What if tech giants had to buy it from us.
- CNN Indonesia. (2020a, May 9). Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20-501305/kekacauan-bansos-corona-masalah-klasik-big-data>
- CNN Indonesia. (2020b, May 14). Kemensos Ungkap Alasan Data Penerima Bansos Semrawut. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514132828-532-503333/kemensos-ungkap-alasan-data-penerima-bansos-semrawut>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Egeham, lisa. (2020, May 3). Pakar Nilai Pentingnya Integrasi Data bagi Pemerintah Tentukan Strategi Tangani Corona. <https://www.liputan6.com/news/read/4243994/pakar-nilai-pentingnya-integrasi-data-bagi-pemerintah-tentukan-strategi-tangani-corona>
- Geerts, H., Dacks, P. A., Devanarayan, V., Haas, M., Khachaturian, Z. S., Gordon, M. F., Maudsley, S., Romero, K., Stephenson, D., & Brain Health Modeling Initiative (BHMI). (2016). Big data to smart data in Alzheimer's disease: The brain health modeling initiative to foster actionable knowledge. *Alzheimer's & Dementia*, 12(9), 1014–1021. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2016.04.008>
- Holzner, B. (2010). *Gender Equality and Empowerment of Women: Policy Document*. Federal Ministry fo European and International Affairs.
- Jayawadene, V., Sadiq, S., & Indulska, M. (2013). The curse of dimensionality in data quality. ACIS 2013: 24th Australian conference on information system.
- Kemensos. (2018). *Monitoring dan Evaluasi PKH*. <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181008112906.pptx>
- Kurniawan, asep. (2020). Bantuan langsung tunai—Dana desa untuk menangani dampak pandemi covid-19: Cerita dari desa (Catatan Penelitian No. 4/2020). SMERU research institution. [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04\\_covidblt\\_in.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04_covidblt_in.pdf)
- Malhotra, A. (2009). *Innovation for women's empowerment and gender equality*. International center for research on women (ICRW).
- MIT Technology Review Custom. (2016). The rise of data capital. [www.oracle.com/bigdata](http://www.oracle.com/bigdata)
- Nafi'ah, B. A. (2020). Dynamics of Stakeholder Collaboration in Bojonegoro's Open Data Program. *Policy & Governance Review*, 4(1), 28–39. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.142>
- Page, N., & Czuba, C. E. (1999). Empowerment: What is it? *J.Ext.*, 37(5).
- Ruwaida, I. N. (2020, April 16). Pandemi Covid-19 Memicu Konflik Sosial Horizontal dan Vertikal di Indonesia. <http://s2sosiologi.fisip.unair.ac.id/pandemi-covid-19-memicu-konflik-sosial-horizontal-dan-vertikal-di-indonesia/>

- Satria. (2020, May 15). Pengamat UGM: Data Penerima Bansos Covid-19 Perlu Diperbarui. <https://ugm.ac.id/id/berita/19429-pengamat-ugm-data-penerima-bansos-covid-19-perlu-diperbarui>
- SMRC. (2020). Wabah COVID-19: Efektivitas Bantuan Sosial. <https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/05/0512-Rilis-covid-12-mei-FINAL.pdf>
- The economist. (2017). The world's most valuable resources is no longer oil, but data.
- United Nations. (2020a). Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. United Nations Sustainable Development Goals. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>
- United Nations. (2020b). The Impact of COVID-19 on Women. [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy\\_brief\\_on\\_covid\\_impact\\_on\\_women\\_9\\_april\\_2020.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf)
- Victoria, A. O. (2020, June 20). Ketua MPR Soroti Hitungan Anggaran Covid-19 yang Terus Naik. <https://katadata.co.id/berita/2020/06/20/ketua-mpr-soroti-hitungan-anggaran-covid-19-yangterus-naik>
- Warth, Lisa, & Koparanova, Malinka. (2012). Empowering women for sustainable development. United Nation Economic Commission for Europe.
- West, Sarah. (2019). Data capitalism: Redefining the logics of surveillance and privacy. 58(1), 20–41.